

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI (LKPJ)

URUSAN DESENTRALISASI

SKPD: **DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP**

EXECUTIVE SUMMARY

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada paksaan. Berdasarkan musyawarah bersama dengan seluruh pegawai di jajaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap telah dirumuskan sebuah Visi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dimana akan mewujudkan Keberdayaan Masyarakat Menuju Keluarga Berkualitas. Dengan demikian visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Makna Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian visi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap ***“Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang, yang berkeadilan gender, dengan pemenuhan terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam rangka Menjadikan Kabupaten Cilacap yang Sejahtera secara Merata”***. Maksud dari pada Visi tersebut adalah menjadikan Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap sebagai Institusi / SKPD yang berperan membantu tugas pokok dan fungsi Bupati Cilacap dalam mewujudkan masyarakat sejahtera secara merata dengan fokus pada pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar cita - cita / tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi juga merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan / program instansi

pemerintah ingin dicapai. Misi dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dan diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui alasan keberadaannya. Misi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap adalah :

1. Meningkatkan keberdayaan perempuan yang berwawasan gender
2. Meningkatkan kualitas hidup, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
3. Meningkatkan pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera guna tercapainya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera yang berwawasan kependudukan
4. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengelolaan pembangunan khususnya pemberdayaan keluarga miskin

Visi dan misi tersebut mempunyai tujuan melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan secara profesional yang efektif dan efisien dibidang pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di Kabupaten Cilacap.

Secara keseluruhan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 23.285.176.000,-** (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji, TPP dan Insentif) sebesar Rp. **15.220.316.000,-** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **8.064.860.000,-** Adapun realisasi penyerapan anggaran Belanja Tidak langsung (Gaji, TPP dan Insentif) sebesar Rp. 13.383.604.125,- yang digunakan untuk pembayaran Gaji pegawai Dinas KB, PP dan PA, tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja (TPP), tunjangan tempat bertugas tunjangan kematian, Asuransi, JKK, dan JKM. Dari penyerapan Belanja tidak langsung tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 12,07% dikarenakan pada tahun 2017 terdapat pegawai mutasi masuk ke Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap sejumlah 13 pegawai, dan 4 pegawai pensiun.

Sedangkan Belanja langsung penyerapannya sebesar Rp. 7.623.758.563,- dengan rincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.286.180.000,- Belanja Barang / Jasa sebesar Rp. 4.243.007.113,- dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 2.094.571.450,- yang dilaksanakan untuk mendukung program-program yang telah ditetapkan. Belanja langsung pada Tahun 2017 mencapai penyerapan 94,53 %. Ada beberapa kegiatan yang penyerapannya kurang maksimal dikarenakan berbagai hal antara lain efisiensi anggaran, penganggaran yang berlebih, rendahnya akseptor KB metode MOW, MOP, kesalahan dalam perencanaan penganggaran rekening belanja, dan rendahnya akseptor untuk pemasangan IUD dan implant

I. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap menyelenggarakan 2 urusan wajib dan 1 urusan eks-rutin, adapun secara rinci masing - masing program dan kegiatan yang dijalankan adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Eks-rutin

Total anggaran Untuk urusan eks-rutin kantor adalah Rp. 2.204.015.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.087.639.883,- (95,40%) yang terbagi menjadi 2 Program dan 11 kegiatan, secara rinci sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

a. Rencana Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 315.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 222.752.941,- (70,70%) yang digunakan untuk pembayaran rekening telepon, koran, air dan listrik selama 12 Bulan 1 Kantor Dinas KB, PP dan PA, 24 Gedung Balai Penyuluh KB
- 2) Penyediaan jasa administrasi Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 469.550.000,- terserap sebesar Rp. 469.370.000,- (99,96%), yang digunakan untuk pembayaran jasa administrasi keuangan selama 1 tahun yang terdiri untuk pembayaran 1 tim, 1 PPK, 8 PPTK, 15 Bendahara Pengeluaran Pembantu, 12 bulan, Pengaman Kantor, Honor Kontrak, dan juga uang lembur PNS selama 12 bulan
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- terserap sebesar Rp. 99.307.700,- (99,13%) yang digunakan untuk penyediaan alat tulis kantor untuk kebutuhan Badan, 4 Unit Pelaksana Teknis dan 20 Koordinator PKB/PLKB.
- 4) Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,- terserap sebesar Rp. 249.997.000,- (100,00%) yang digunakan untuk pemenuhan Barang Cetak dan penggandaan administrasi di Kantor Dinas KB, PP dan PA, 4 Unit Pelaksana Teknis dan 20 Koordinator PKB/PLKB
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- terserap sebesar Rp. 24.699.500,- (98,80%), yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor selama 12 bulan untuk 1 kantor Badan dan 4 Unit Pelaksana Teknis dan 20 Koordinator PKB/PLKB

- 6) Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,- terserap sebesar Rp.249.500.000,- (99,80%) yang digunakan untuk pemenuhan makan dan minum rapat di Kantor Badan, 4 UPT, dan 20 Koordinator PKB/PLKB selama 12 bulan.
 - 7) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.325.235.000,- terserap sebesar Rp.322.235.000,- (99,08%) yang digunakan untuk pelaksanaan 12 rakor di 24 Kecamatan, 24 Pembinaan, Koordinasi dalam daerah dan luar daerah, dan juga untuk memenuhi undangan rapat dinas di dalam daerah maupun di luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 1) Pengadaan peralatan gedung kantor alokasi anggaran Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.49.913.600,- (99,83%) sehingga sisa anggaran Rp. 86.400,- adapun pengadaan peralatan gedung kantor yang terealisasi adalah 2 unit PC Komputer, 2 unit Laptop, 4 unit printer, 2 unit UPS, dan 2 unit Harddisk Eksternal.
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan anggaran Rp.294.150.000,- terserap sebesar Rp.280.698.900,- (95,43%) sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 13.451.100,00,- hal ini juga adanya biaya umum pendukung pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan efisien dan adanya sisa kontrak. Pekerjaan – pekerjaan yang dilaksanakan antara lain :
 - 3 paket pemasangan paving blok,
 - 2 paket pemeliharaan gedung kantor dan balai KB,
 - 1 paket pembangunan pos satpam gudang,
 - 1 paket tempat parkir gudang
 - 3) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional dengan alokasi anggaran Rp.300.000.000,- / tahun terealisasi sebesar Rp.297.238.342,- (99,08%) untuk perawatan 12 bulan, 8 unit kendaraan dinas roda 4, 135 unit kendaraan roda 2.
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- terserap sebesar Rp.47.101.200,- (94,20%), untuk kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor antara lain 15 unit CPU, 15 monitor, 20 unit laptop, 3 unit slide proyektor, 15 unit printer, 5 unit mesin ketik, 22 unit AC selama 1 tahun.

B. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Total Anggaran Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera Rp. 4.870.845.000,- untuk melaksanakan 4 Program 27 Kegiatan dengan capaian realisasi keuangan adalah Rp. 4.562.230.855,- (94,72%), secara rinci sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana

1) Pelayanan KIE

- a) Rencana Kegiatannya adalah untuk pelayanan komunikasi, Edukasi dan Informasi melalui pelayanan mobil unit penerangan program KB dengan target 36 Kegiatan mupen, 1 kegiatan KIE Massa karnaval, 1 kegiatan KIE massa melalui pameran pembangunan, 432 orang untuk mendukung pelayanan KIE dengan alokasi Rp.65.000.000,-
- b) Hasil yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan pelayanan komunikasi, Edukasi dan Informasi melalui pelayanan mobil unit penerangan program KB dengan sasaran 28 Kegiatan mupen, 1 kegiatan KIE Massa karnaval, 1 kegiatan KIE massa melalui pameran pembangunan, 432 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.433.400,- (57,59%)

2) Kegiatan Promosi Pelayanan Khiba

- a) Rencana Kegiatannya adalah Revitalisasi Paguyuban donor darah dan pelayanan donor darah dengan alokasi anggaran Rp.75.000.000,
- b) Hasil yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan Pelayanan Khiba untuk mendukung Program KB di Kabupaten Cilacap dengan menjangkau 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.533.000,- (96,71%)

3) Pembinaan Keluarga Berencana

- a) Rencana Kegiatannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KB dengan diintegrasikan dengan peringatan organisasi organisasi muslimat NU, Aisyiah, Bayangkari, Polri, TNI, dan PKK dengan alokasi anggaran Rp.90.000.000,-
- b) Hasil yang diperoleh adalah terlaksananya Kegiatan KB Manunggal dengan Muslimat, Aisyiah, Polri, TNI, dan PKK, BBGRM, dan Lomba KB bagi generasi muda dengan menjangkau 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap sejumlah 7 Kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.70.415.320,- (78,24%)

4) Pembangunan Pagar Gedung Balai KB

- a. Rencana kegiatannya adalah untuk pembangunan pagar gedung balai KB dengan jumlah 7 paket kegiatan dan pemasangan paving halaman Balai KB dengan jumlah 5 paket pemasangan paving, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.125.000,-
- b. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pembangunan pagar gedung Balai KB sejumlah 6 paket pekerjaan dan pemasangan paving sejumlah 5 paket pemasangan paving dengan tujuan penataan lingkungan sekitar

Balai KB dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 253.829.950,00,-
(92,94%)

5) Kegiatan Operasional Petugas Pembantu KB Desa / PPKBD

- a) Rencana kegiatannya adalah untuk memberikan bantuan operasional bagi Petugas Pembantu KB desa @ 200.000,- / bulan / orang sejumlah 287 PPKBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.550.000.000,-
- b) Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya operasional bagi Petugas Pembantu KB desa @ 200.000,- / bulan / orang dengan sasaran 287 PPKBD di 284 desa 24 Kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PPKBD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.549.333.400,- (99,88%)

6) Kegiatan Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera

- a) Rencana kegiatannya adalah untuk pendataan keluarga peserta KB dan Keluarga pra sejahtera dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
- b) Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pendataan keluarga peserta KB dan keluarga pra sejahtera dengan hasil untuk memperoleh data basis keluarga dan individu anggota keluarga yang memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh keadaan di lapangan sampai ke tingkat keluarga untuk kepentingan penetapan perencanaan, kebijakan, pengendalian dan penilaian oleh pelaksana di semua tingkatan dengan sasaran di 24 kecamatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.38.698.700,- (77,40%)

7) Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Komunikasi Informasi dan edukasi dengan Baliho

- a) Rencana kegiatannya adalah Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Komunikasi Informasi dan edukasi dengan Baliho dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,-
- b) Hasil yang diperoleh terlaksananya rapat evaluasi program KB oleh plkb lapangan setiap 3 bulan sekali / distrik dengan tujuan untuk mengevaluasi capaian program KB yang dilaksanakan oleh PLKB dan saling koordinasi serta mencari solusi dari setiap permasalahan program KB di lapangan dengan sasaran kegiatan 112 PKB/PLKB di 4 distrik dengan realisasi keuangan sebesar Rp.145.827.500,- (97,22%)

8) Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan program KB tribulanan

- a) Rencana Keegiatannya adalah rapat koordinasi, rapat evaluasi program KB yang dilaksanakan oleh masing – masing UPT di 4 distrik setiap 3 bulan sekali dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,
 - b) Hasil yang diperoleh terlaksananya rapat evaluasi program KB oleh plkb lapangan setiap 3 bulan sekali / distrik dengan tujuan untuk mengevaluasi capaian program KB yang dilaksanakan oleh PLKB dan saling koordinasi serta mencari solusi dari setiap permasalahan program KB di lapangan dengan sasaran kegiatan 112 PKB/PLKB di 4 distrik dengan realisasi keuangan sebesar Rp.44.777.800,- (89,56%)
- 9) Rakerda Bidang KB
- a) Rencana kegiatannya adalah pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga di Kabupaten Cilacap. dalam rangka mendapatkan dukungan mitra kerja dan stakeholder di Tingkat Kabupaten Cilacap, serta memperkuat koordinasi dan kemitraan lintas sektor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga di Kabupaten Cilacap. dalam rangka mendapatkan dukungan mitra kerja dan stakeholder di Tingkat Kabupaten Cilacap, serta memperkuat koordinasi dan kemitraan lintas sektor dengan tujuan untuk pencapaian program KB meningkat dengan realisasi anggaran sebesar Rp.39.731.800,- (99,33%)
- 10) Pelayanan KIE KB melalui kelompok masyarakat / lembaga
- a) Rencana Keegiatannya adalah untuk Terlaksananya pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) bagi kelompok masyarakat / lembaga dengan alokasi anggaran Rp.125.000.000,-
 - b) Hasil yang diperoleh adalah Terlaksananya pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) bagi kelompok masyarakat / lembaga, melalui kegiatan Pencanaan Kampung KB di berbagai desa yaitu 1 kegiatan, 5 lembaga / kelompok, 5 desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp.113.318.000,- (90,65%)
- 11) Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional
- a) Rencana kegiatannya adalah untuk Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Cilacap sejumlah 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai terlaksananya kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Cilacap dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.430.710,- atau (77,38)%

- 12) Kegiatan Pembangunan Ruang rapat Balai penyuluh KB
- a) Rencana kegiatannya adalah untuk Pembangunan Ruang rapat Balai penyuluh KB .dengan anggaran Rp.1.000.000.000,- yang meliputi pembangunan Pembangunan Ruang rapat Balai penyuluh KB dan pengadaan mebelair ruang rapat.
 - b) Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 paket Pembangunan Ruang rapat Balai penyuluh KB Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap meliputi ruang rapat Balai KB Bantarsari, Balai KB Patimuan, Balai KB Cilacap Tengah, dan Balai KB Nusawungu guna memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan rapat rapat serta 1 paket pekerjaan pengurangan lokasi Balai KB Bantarsari, meja rapat 16 unit, kursi rapat sejumlah 204 unit, kursi putar 4 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp.982.805.100,- atau (98,28)%
- 13) Pengadaan Baliho Sosialisasi Program KB dan Pola Hidup Sehat
- a) Rencana kegiatannya adalah Pengadaan Baliho Sosialisasi Program KB dan Pola Hidup Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah tersedianya Pengadaan Baliho Sosialisasi Program KB dan Pola Hidup Sehat dengan realisasi 4 paket kerangka baliho, 3 paket MMT Baliho dengan realisasi anggaran sebesar Rp 98.008.000,- atau 98,01%
- 14) Kegiatan Dukungan Pelayanan KB MOW MOP
- a) Rencana kegiatan pelayanan KB medis operasi melalui metode MOP dan MOW dengan target 50 akseptor MOP dan 120 akseptor MOW dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah terselenggaranya pelayanan KB medis operasi MOP dan MOW dengan jumlah 11 akseptor MOP dan 41 akseptor MOW, capaian kinerja ini rendah karena ada kegiatan yang serupa yang sudah di akomodir oleh Anggaran BKKBN Pusat sehingga realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.32.933.125,- (65,87%)
- 15) Pavingisasi Halaman dan Pembangunan Gudang kantor KB Kecamatan Adipala
- a) Rencana kegiatannya adalah untuk Pavingisasi Halaman dan Pembangunan Gudang kantor KB Kecamatan Adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah tersedianya Gudang kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan Adipala dan pavingisasi halaman Gudang Balai KB Adipala

yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi di wilayah Kecamatan Adipala dengan realisasi anggaran sebesar Rp.97.275.000,- atau (97,28)%

- 16) Pengadaan Genre KIT (DAK 2017)
 - a) Rencana Kegiatannya adalah Pengadaan Genre KIT (DAK 2017) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.277.700.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah tersedianya Pengadaan Genre KIT (DAK 2017) sejumlah 9 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp.272.426.450,- atau (98,10%)
 - 17) Pengadaan Sarana Kerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) (DAK 2017)
 - a) Rencana Kegiatannya adalah Pengadaan Sarana Kerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) (DAK 2017) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.960.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah tersedianya Pengadaan Sarana Kerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) (DAK 2017) sejumlah 60 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp.149.044.500,- atau (97,44%)
 - 18) Pengadaan Sarana Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) (DAK 2017)
 - a) Rencana Kegiatannya adalah Pengadaan Sarana Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) (DAK 2017) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.428.400.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah tersedianya Pengadaan Sarana Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) (DAK 2017) sejumlah 60 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp.422.315.300,- atau (98,58%)
 - 19) Bantuan Operasional KB (BO KB) (DAK 2017)
 - a) Rencana Kegiatannya adalah Bantuan Operasional KB (BO KB) (DAK 2017) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.794.160.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah tersedianya Bantuan Operasional KB (BO KB) (DAK 2017) selama 12 bulan, 58 Klinik KB, 284 Desa/Kel, 24 Kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.691.439.100,- atau (87,07%)
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- 1) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
 - a) Rencana kegiatan pelayanan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di sekolah - sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,-
 - b) Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah sehingga capaiannya 0%.

- 2) Pengembangan dan pembinaan PIK KRR
 - a) Rencana Kegiatan Pengembangan dan pembinaan PIK KRR dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000
 - b) Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pengembangan dan pembinaan PIK KRR sejumlah 1 kegiatan, 27 kelompok, 62 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.091.500,- atau (98,18%)
3. Program Pelayanan Kontrasepsi KB
 - 1) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
 - a) Rencana kegiatan pelayanan Medis Operasi IUD dan Implan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,- dengan target IUD = 296, implant = 475
 - b) Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya pelayanan peserta KB IUD dan Implan guna meningkatnya peserta KB Baru dan peserta KB aktif dengan capaian IUD = 275, sedangkan implant = 475 dengan realisasi anggaran sebesar Rp72.865.625,- atau 97,15%
 - 2) Kegiatan Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi
 - a) Rencana kegiatan pengadaan obat efek samping kontrasepsi adalah pengadaan obat efek samping kontrasepsi sejumlah 1 paket, 11 jenis obat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah terealisasinya pengadaan obat efek samping kontrasepsi sejumlah 1 paket yang terdiri dari Amoksilin Kaplet 500 mg, Asem Mefenamat Tablet salut 500 mg, alkohol salutin 70% 100ml, Betadin sol 30 ml, Kas Hidrofil, Kapas pembalut / absorbun 250 gr, PP Test, Plester Hansaplast, Kas Hidrofil steril, Plastik klip, Albotil, byclean 500ml dengan realisasi Rp.24.982.850,- (99.93%)
 - 3) Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi
 - a) Rencana kegiatan adalah penanganan kegagalan dan komplikasi dari suatu kegiatan pemasangan alat kontrasepsi untuk para akseptor KB baru dengan target 7 kasus dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya kegiatan penanganan kegagalan dan komplikasi dari suatu kegiatan pemasangan alat kontrasepsi untuk para akseptor KB baru sejumlah 11 kasus dengan realisasi anggaran sebesar Rp24.964.100,- (99,86%)

- 4) Kegiatan Penyediaan Operasional Pengambilan dan Distribusi alat kontrasepsi
 - a) Rencana kegiatan penyediaan operasional pelayanan Penyediaan alat kontrasepsi dengan cara pengambilan alkon di BKKBN regional Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,-
 - b) Kegiatan ini tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya kesalahan dalam pengalokasian belanja rekening yang seharusnya perjalanan dinas luar daerah tetapi dialokasikan belanja perjalanan dinas dalam daerah sehingga realisasi anggaran sebesar Rp.0,- (0%)
- 5) Pengadaan Almari Penyimpan Alokon (DAK 2017)
 - a) Rencana kegiatannya adalah pengadaan Almari Penyimpan Alokon sejumlah 34 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.500.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah tersedianya Almari Penyimpan Alokon sejumlah 34 unit yang nantinya akan disalurkan ke masing masing fasyankes / Klinik KB di Kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 183.433.500,00,- atau 96,80%
4. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam KB/KR yang Mandiri
 - 1) Kegiatan Pembinaan Kelompok UPPKS
 - a) Rencana kegiatannya adalah Pembinaan Kelompok UPPKS dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pembinaan Kelompok UPPKS sejumlah 1 Kegiatan untuk 82 kelompok, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.48.317.125,- (96,63%)

C. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Total Anggaran Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebesar Rp. 2.130.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.004.827.334,- yang digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) Program 22 (dua puluh) Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
 - 1) Pelaksanaan Advokasi Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - a) Rencana Kegiatan adalah Pelaksanaan Advokasi Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak anggaran sebesar Rp.40.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah Pelaksanaan Advokasi Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sejumlah 1 kegiatan 40 peserta dengan realisasi anggaran sebesar Rp.39.197.950,- atau (97,99%)
 - 2) Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah

- a) Rencana Kegiatan adalah Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000
 - b) Hasil yang dicapai adalah Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah sejumlah 1 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.905.400,- atau (99,81%)
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - a) Rencana Keegiatannya adalah Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui penyuluhan tindak kekerasan di 15 sekolah dengan alokasi anggaran Rp. 40.000.000,-
 - b) Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui penyuluhan tindak kekerasan di 1 kegiatan, 15 sekolah dengan penyerapan anggaran Rp.39.837.100,- (99,59%)
 - 2) Kegiatan Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
 - a) Rencana Keegiatannya adalah Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak sejumlah 1 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- atau (100,00%)
 - 3) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 - a) Rencana Keegiatannya adalah peningkatan dan pengembangan Pusat Pelayanan terpadu (PPT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya peningkatan dan pengembangan Pusat Pelayanan terpadu (PPT) dengan sasaran kegiatan adalah 4 kegiatan, 4 distrik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.290.600,00,- (96,39%)
 - 4) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak

- a) Rencana Kegiatannya adalah untuk biaya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan melalui forum anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya pemantapan dan reorganisasi forum anak di Kabupaten Cilacap (FORACI) serta penyuluhan dan sosialisasi kepada anak dengan sasaran kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.39.819.975,- atau 96,55 %
- 5) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui KLA
 - a) Rencana Kegiatannya adalah untuk biaya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan melalui KLA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya pengembangan Kecamatan Layak Anak dalam rangka menuju Kabupaten Cilacap Layak dengan sasaran 4 Kecamatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.48.199.900,- (96,40%)
- 6) Pelaksanaan Peringatan hari Kartini dan hari Ibu
 - a) Rencana Kegiatannya adalah untuk pelaksanaan peringatan hari Kartini dan Hari Ibu Tingkat Kabupaten Cilacap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu melalui Kegiatan Upacara Peringatan dan resepsi dengan sasaran yaitu organisasi wanita di Kabupaten Cilacap, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.600.000,- (99,20%), dengan realisasi 2 Kegiatan
- 7) Pelaksanaan Peringatan hari Anak Nasional
 - a) Rencana Kegiatannya adalah untuk pelaksanaan peringatan hari anak nasional Tingkat Kabupaten Cilacap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya peringatan Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional melalui Kegiatan Upacara Peringatan Upacara dan kegiatan yang berorientasi pada perlindungan anak dengan sasaran adalah Anak-anak di Kabupaten Cilacap, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.44.699.925,- (99,33%)
- 8) Fasilitasi dan Advokasi bagi Anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - a) Rencana Kegiatannya adalah untuk pelaksanaan Fasilitasi dan Advokasi bagi Anak berhadapan dengan hukum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

- b) Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya pelaksanaan Fasilitasi dan Advokasi bagi Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan sasaran 1 kegiatan, 4 kecamatan, 270 orang dengan tujuan memberikan advokasi dan pendampingan kasus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.660.950,- (99,32%)
- 9) Pemulihan phisik dan psikis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - a) Rencana Kegiatannya adalah pelaksanaan pemberian bantuan nutrisi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,-
 - b) Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau (0%)
- 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - 1) Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu
 - a) Rencana Kegiatan adalah Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu dengan alokasi anggaran Rp. 70.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu dengan sasaran kegiatan yaitu 2 kegiatan, 5 Kecamatan, 370 orang dengan realisasi keuangan yaitu Rp.69.657.850,- (99,51%)
 - 2) Fasilitasi Kecamatan Sayang Ibu
 - a) Rencana kegiatan adalah terlaksananya dukungan operasional kegiatan Fasilitasi Kecamatan Sayang Ibu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,
 - b) Kegiatan ini tidak terlaksana, karena adanya rasionalisasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (0%)
 - 3) Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan
 - a) Rencana Kegiatan adalah pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten/Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000-
 - b) Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelaksanaan rakor PPT Tingkat Kabupaten/Kecamatan dengan realisasi Rp. 24.997.450,- (99,99%) yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu dengan sasaran 1 kegiatan, 115 orang peserta.
 - 4) Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Citra
 - a) Rencana Kegiatan adalah untuk Operasional pendukung kegiatan PPT “Citra” dengan alokasi anggaran Rp.125.000.000,-
 - b) Hasil yang dicapai adalah terlaksananya dukungan operasional pendukung kegiatan PPT “Citra” dalam rangka Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan di Kabupaten

Cilacap, dengan realisasi korban 110 korban kekerasan selama tahun 2017 dengan realisasi keuangan yaitu Rp. 121.373.050,- atau (97,10%)

5) Advokasi dan sosialisasi HIV / AIDS bagi Kelompok rentan (Ibu Rumah tangga)

a) Rencana kegiatan adalah sosialisasi HIV / AIDS bagi ibu rumah tangga dengan sasaran kegiatan adalah 4 Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 55.000.000,-

b) Hasil yang dicapai terlaksananya kegiatan sosialisasi HIV / AIDS bagi ibu rumah tangga di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Dayeuhluhur, Kecamatan Patimuan, Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Nusawungu dengan penyerapan Rp. 54.249.000,- atau (98,63%)

3 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

a) Rencana kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

b) Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dengan sasaran 2 kegiatan dengan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.97.771.900,- (97,77%)

2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

a) Rencana kegiatannya adalah Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0

b) Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sehingga capaiannya 0%

3) Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

a) Rencana kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,-

b) Hasil yang dicapai adalah meningkatnya Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha dengan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.47.789.850,- atau 95,58% dengan sasaran 1 kegiatan, 100 orang

4) Kegiatan Pembinaan Organisasi Dharma Wanita Persatuan

a) Rencana kegiatan adalah pelaksanaan Pembinaan Organisasi Dharma Wanita Persatuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

- b) Hasil yang dicapai adalah pelaksanaan Pembinaan Organisasi Dharma Wanita Persatuan sejumlah 6 kegiatan (12 bulan) dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berorganisasi dengan realisasi adalah sebesar Rp 99.836.925,- atau 99,84%

Dari seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Tahun 2017 berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan antara lain :

Dalam hal urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, Dinas KB, PP dan PA berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pelayanan KB berupa sarana dan prasarana untuk mendukung Program KB seperti halnya Penataan lingkungan sekitar Bangunan Gudang Alokon meliputi pembangunan Pos Satpam, pembangunan tempat parkir dan pemasangan paving halaman gudang alokon, pembangunan ruang pertemuan Balai Penyuluh KB di 4 Kecamatan meliputi Ruang rapat Balai KB Kecamatan Patimuan, Nusawungu, Cilacap Tengah dan Bantarsari, penataan lingkungan sekitar Balai Penyuluh KB melalui pembuatan pagar keliling dan pemasangan paving Balai Penyuluh KB, penyediaan perasional petugas pembantu KB Desa, pengadaan KIE KB sehingga pelayanan KIE KB dapat secara efektif dilaksanakan. Terlayannya perkiraan permintaan masyarakat dalam ber KB, terbinanya peserta KB aktif dan meningkatnya Institusi masyarakat pedesaan. Tersedianya data mikro kependudukan Keluarga Berencana dan pentahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Cilacap. Disamping itu melakukan pembinaan keluarga berencana melalui berbagai kegiatan meliputi rakor evaluasi program KB tribulanan, pembinaan program KB melalui media luar Baliho, dialog KB di radio, dan berperan aktif dengan dukungan program KB dari tokoh-tokoh agama di Kabupaten Cilacap, serta melaksanakan penerangan, komunikasi, edukasi dan informasi KB melalui media mobil unit penerangan dan pemasangan baliho ajakan untuk ber-KB.

Kemudian dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Terlindunginya ha-hak anak melalui kegiatan forum komunikasi dan aspirasi bagi anak dalam pembangunan. Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan, meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga penanganan Korban tindak kekerasan di Pusat pelayanan Terpadu, pelaksanaan peringatan hari besar nasional seperti Hari Kartini, Hari Anak Nasional, dan Hari Ibu. Sosialisasi HIV/AIDS, Sosialisasi Pencegahan penanggulangan Perdagangan Orang, Sosialisasi Peradilan Pidana Anak, serta pendampingan dan advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga, pelaksanaan pelatihan analisis gender,

pemenuhan bantuan psikis dan fisik bagi korban kekerasan, pengembangan Kabupaten / Kecamatan layak anak, serta pematapan kelembagaan paguyuban tenaga kerja perempuan di Kabupaten Cilacap serta menggalakkan kembali kepedulian masyarakat dalam hal pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

II. URUSAN WAJIB TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan Desa, dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan Tugas Tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pada tahun anggaran 2017 Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap tidak mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan baik berupa kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik lainnya.

III. KEPEGAWAIAN

1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap keadaan pada Bulan Desember 2017 adalah berjumlah 166 orang.

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

- Strata 2 / Magister	:	10 Orang
- Strata 1 / Sarjana	:	77 Orang
- Sarjana Muda	:	2 Orang
- Diploma III	:	17 Orang
- Diploma II	:	1 Orang
- SLTA	:	46 Orang
- SLTP	:	1 Orang
- SD	:	0 Orang
- Harian kontrak	:	12 Orang
Jumlah	:	166 Orang

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

- Golongan IV c (Pembina Utama Muda)	:	1 Orang
- Golongan IV b (Pembina Tingkat I)	:	8 Orang
- Golongan IV a (Pembina)	:	40 Orang
- Golongan III d (Penata Tingkat I)	:	28 Orang

- Golongan III c	(Penata)	:	30	Orang
- Golongan III b	(Penata Muda Tingkat I)	:	20	Orang
- Golongan III a	(Penata Muda)	:	10	Orang
- Golongan II d	(Pengatur Tingkat I)	:	4	Orang
- Golongan II c	(Pengatur)	:	11	Orang
- Golongan II b	(Pengatur Muda Tingkat I)	:	0	Orang
- Golongan II a	(Pengatur Muda)	:	-	Orang
- Golongan I d	(Juru Tingkat I)	:	1	Orang
- Golongan I c	(Juru)	:	1	Orang
- Golongan I b	(Juru Muda Tingkat I)	:	0	Orang
- Golongan I a	(Juru Muda)	:	0	Orang
- CPNS		:	0	Orang
- Non Golongan		:	12	Orang
		Jumlah	:	166
				Orang

4. Komposisi Pegawai Golongan

- Golongan IV		:	49	Orang
- Golongan III		:	88	Orang
- Golongan II		:	15	Orang
- Golongan I		:	2	Orang
- Non Golongan		:	12	Orang
		Jumlah	:	166
				Orang

5. Menurut Status PNS

- PNS		:	154	Orang
- CPNS		:	0	Orang
- Harian Kontrak / lokal		:	12	Orang
		Jumlah	:	166
				Orang

6. Jumlah Pejabat Struktural

- Eselon II b		:	1	Orang
- Eselon III a		:	1	Orang
- Eselon III b		:	4	Orang
- Eselon IV a		:	15	Orang
- Eselon IV b		:	4	Orang
		Jumlah	:	25
				Orang

7. Jumlah Pejabat fungsional

- Fungsional		:	114	Orang
		Jumlah	:	114
				Orang

8. Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Diklatpim yang pernah diikuti

- Eselon II b	:	0 Orang
- Eselon III a	:	1 Orang
- Eselon III b	:	4 Orang
- Eselon IV a	:	13 Orang
Eselon IV b	:	2 Orang
Jumlah		<hr/> 20 Orang

IV. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan dengan langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur;
2. Penyusunan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan;
3. Musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat (stakeholders);
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;

Secara umum proses penyusunan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD.
3. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja – SKPD.
4. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang.
5. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintah
6. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD .
7. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang.
8. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD;
9. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Program-program yang telah ditetapkan sebagai bahan perencanaan dan atau pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program yang ditetapkan dalam RPJMD pada Dinas KB, PP dan PA meliputi :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program Keluarga Berencana
 - f. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - g. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
 - h. Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling
 - i. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anakProgram pengembangan model operasional BKB dan Pusyandu
 - j. Program Pembinaan Keluarga Sejahtera
 - k. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - l. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - m. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
 - n. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - o. Program Pengembangan Bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
2. Program yang ditetapkan dalam RKPD pada urusan Dinas KB, PP dan PA dan meliputi
 - a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - d) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - e) Program Keluarga Berencana
 - f) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - g) Program Pelayanan Kontrasepsi
 - h) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri
 - i) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

- j) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - k) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - l) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program yang ditetapkan dalam RENJA 2017 SKPD pada urusan Dinas KB, PP dan PA meliputi :
- a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - d) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - e) Program Keluarga Berencana
 - f) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - g) Program Pelayanan Kontrasepsi
 - h) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri
 - i) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 - j) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - k) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - l) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program yang ditetapkan dalam RKA SKPD pada urusan Bapermas PP, PA dan KB meliputi :
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - d) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - e) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - f) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - g) Program Keluarga Berencana
 - h) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - i) Program Pelayanan Kontrasepsi
 - j) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri
5. Program yang ditetapkan dalam DPA SKPD pada urusan Dinas KB, PP dan PA meliputi :
- a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
 - b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
 - c) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

- d) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
- e) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- f) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- g) Program Keluarga Berencana
- h) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- i) Program Pelayanan Kontrasepsi
- j) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

V. SARANA DAN PRASARANA

Sarana kerja yang dimiliki Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap keadaan Bulan Desember 2017 ini untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, antara lain sebagai berikut :

**Data Sarana dan Prasarana
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap tahun 2017**

No.	Jenis>Nama Barang		Jumlah	Keadaan	
1	2		3	4	
1	Telepon:				
	a.	Keluar Kantor	2	Baik	
	b.	Intern	1	Baik	
	c.	Faximile	1	Baik	
2	Computer :				
	a.	CPU	11	Baik	
	b.	Monitor	11	Baik	
	c.	Printer	37	Baik	
			9	Rusak Berat	
	d.	Hardisk Eksternal	2	buah	
	d.	Komputer Kompatible	24	baik	
3	Computer Laptop		60	Baik	
4	Proyektor + Attachment		26	Baik	
5	Layar Proyektor		24	Baik	
6	Mesin Ketik		4	Baik	
			3	Rusak	
7	AC Split		26	Baik	
			2	Rusak	
8	Peta Kabupaten		1	Baik	

9	Kendaraan Roda 2	354	Baik	176 motor
			Rusak Ringan	3 motor
			Rusak Berat	175 motor
10	Kendaraan Roda 4	9	Baik	
11	Meja	711	Baik	
12	Kursi	1468	Baik	
13	Sofa	25	baik	
14	Filling Besi/Metal	48	Baik	
15	Mebelair lainnya	3	baik	
16	Kamera	4	Baik	
17	Brangkas	1	Baik	
18	Alat Pemadam Portable	19	Baik	
19	Tabung Gas	1	Baik	
20	Lemari Es	1	Baik	
21	Kompor Gas	1	Baik	
22	Lemari Besi	42	Baik	
23	Lemari Buku Pejabat Eselon II	1	Baik	
24	Lemari Buku Pejabat Eselon III	1	Baik	
25	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	Baik	
26	Lemari Kayu	39	Baik	
27	Lemari Kaca	2	Baik	
28	Rak besi / Metal	28	Baik	
29	Rak Kayu	30	Baik	
30	Alat Penghancur Kertas	4	Baik	
31	Whiteboard	25	Baik	
32	Troli	2	baik	
33	Vacum Cleaner	1	baik	
34	Kipas angin	64	baik	
35	Exhause Fan	54	baik	
36	Tangga Aluminium	2	baik	
37	Alat rumah tangga lain	6	baik	
38	UPS	16	baik	
39	Webcam	1	baik	
40	Speaker Aktive Komputer	1	baik	
41	Modem	6	baik	
42	Intercom unit	9	baik	
43	Professional Sound System	12	baik	
44	Paging Mic	9	baik	
45	Chairman/Audio Conference	1	baik	
46	Handycam	1	baik	
47	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1	baik	
48	Camera Film	3	baik	

49	Sound System	1	baik	
50	Handphone	92	baik	
51	Geneacologie Tafel	2	baik	
52	Alat Kedokteran KB Lain Lain	58	baik	
53	Thermometer	2	baik	
54	Examination Lamp	58	baik	
55	Alat Peraga Bina Keluarga Balita (BKB) Kit	213	baik	
56	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	24	baik	
	Tanah dan Bangunan			
29	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.393 m2	Baik	
30	Bangunan Gedung Kantor Permanen	576 m2	Baik	
31	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Majenang	76 m2	Baik	
32	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Sidareja	76 m2	Baik	
33	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Dayeuhluhur	76 m2	Baik	
34	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Bantarsari	76 m2	Baik	
35	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Cilacap Utara	76 m2	Baik	
36	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Wanareja	76 m2	Baik	
37	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Sampang	76 m2	Baik	
38	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Cimanggu	76 m2	Baik	
39	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Cilacap Selatan	76 m2	Baik	
40	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Karangpucung	76 m2	Baik	
41	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Adipala	76 m2	Baik	
42	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Nusawungu	76 m2	Baik	
43	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB	76 m2	Baik	

	Patimuan			
44	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Gandrungmangu	76 m2	Baik	
45	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Kawunganten	76 m2	Baik	
46	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Cilacap Tengah	76 m2	Baik	
47	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Kedungreja	76 m2	Baik	
48	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Binangun	76 m2	Baik	
49	Bangunan Gedung Balai Penyuluh KB Kesugihan	76 m2	Baik	
50	Bangunan Ruang rapat Balai Penyuluh KB Kec. Sidareja	97,77 m2	Baik	
51	Bangunan Ruang rapat Balai Penyuluh KB Kec. Kroya	97,34 m2	Baik	
52	Bangunan Ruang rapat Balai Penyuluh KB Kec. Gandrungmangu	98,33 m2	Baik	
53	Bangunan Ruang rapat Balai Penyuluh KB Kec. Cipari	98,23 m2	Baik	
54	Bangunan Ruang rapat Balai Penyuluh KB Kec. Kedungreja	98,31 m2	Baik	
55	Bangunan Ruang rapat Balai Penyuluh KB Kec. Maos	97,87 m2	Baik	
56	Bangunan Ruang rapat Balai Penyuluh KB Kec. Majenang	97,87 m2	Baik	
57	Bangunan Balai Penyuluh KB Kec. Kedungreja	96,65 m2	Baik	
58	Bangunan Ruang Pertemuan Balai Penyuluh KB Kec. Binangun	98,32 m2	Baik	
59	Bangunan Ruang Pertemuan Balai Penyuluh KB Kec. Adipala	98,30 m2	Baik	
60	Bangunan Ruang Pertemuan Balai Penyuluh KB Kec. Cilacap Utara	98,52 m2	Baik	

61	Bangunan Ruang Pertemuan balai penyuluh KB Kec. Cilacap Selatan	98,37 m2	Baik	
62	Bangunan ruang pertemuan balai penyuluh KB Kec. Jeruklegi	98,78 m2	Baik	
63	Bangunan ruang pertemuan balai penyuluh KB Kec. Kawunganten	98,73 m2	Baik	
64	Bangunan ruang pertemuan balai penyuluh KB Kec. Karangpucung	98,43 m2	Baik	
65	Bangunan ruang pertemuan balai penyuluh KB Kec. Dayeuhluhur	98,66 m2	Baik	
62	Bangunan ruang pertemuan balai penyuluh KB Kec. Cilacap Tengah	98,78 m2	Baik	
63	Bangunan ruang pertemuan balai penyuluh KB Kec. Patimuan	98,73 m2	Baik	
64	Bangunan ruang pertemuan balai penyuluh KB Kec. Bantarsari	98,43 m2	Baik	
65	Bangunan ruang pertemuan balai penyuluh KB Kec. Nusawungu	98,66 m2	Baik	
66	Konstruksi pagar	24 paket	Baik	
65	Media reklame	51 buah	Baik	
66	Tugu Peringatan lainnya	3 paket	Baik	

VI. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dijumpai

Hambatan yang dijumpai dalam melaksanakan program pada tahun 2017

1. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a) Rendahnya Partisipasi Pria dalam Program KB
- b) Rendahnya Metode MKJP dibanding dengan metode Non MKJP
- c) Tingginya Un-meet need
- d) Tingginya Angka Drop Out
- e) Belum optimalnya keseertaan pada kelompok Catur Bina

- f) Lemahnya dukungan terhadap program PIK KRR
 - g) Masih banyak kehamilan yang tidak diinginkan
 - h) Kurangnya Koordinasi dalam penetapan perda redistribusi pelayanan KB
 - i) Tingginya tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk
 - j) Tingginya Total Fertlty Rate (TFR)
 - k) Tingginya angka pernikahan dini
 - l) Tingginya PUS dibawah 20 tahun
 - m) Semakin berkurangnya tenaga PKB / PLKB
 - n) Melemahnya dukungan politis di bidang Pengendalian Penduduk
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal
 - b) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - c) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - d) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - e) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - f) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 - g) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - h) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - i) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - j) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - k) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - l) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
 - m) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - n) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - o) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita

- p) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
- q) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- r) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- s) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- t) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Solusi

1. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a. Revitalisasi Program KB
 - b. Optimalisasi penggarapan sasaran, meningkatkan KIE tentang peran serta pria dalam Program KB dengan menggunakan MOP atau kondom, serta optimalisasi pencatatan dan pelaporan peserta KB Pria.
 - c. Peningkatan pelayanan KB dan pemantapan koordinasi dengan SKPD terkait.
 - d. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja dengan peningkatan jumlah dan peran PIK KRR di setiap kecamatan
 - e. Perlunya subsidi biaya pelayanan untuk keluarga Prasejahtera dan sejahtera 1 dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi keluarga tersebut didalam ber KB
 - f. Perlunya penyediaan biaya operasional PPKBD dan Sub PPKBD yang lebih baik dalam upaya meningkatkan peran institusi tersebut dalam melakukan pembinaan kepada keluarga terutama pasangan usia subur baik yang sudah ber KB maupun yang belum
 - g. Optimalisasi dengan mitra / jaringan / kader yang telah dibina dan dilatih tentang program Keluarga Berencana untuk mengatasi kondisi jumlah penyuluh yang minim
 - h. Pencanangan Kampung KB di setiap Kecamatan / Desa
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Melakukan koordinasi lintas sektoral secara intensif untuk penyajian data dan juga pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan perkembangan PUG, PP, PA, serta penyusunan profil.
 - b. Melakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
 - c. Mengintensifkan melalui pertemuan dan rapat koordinasi kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA);

- d. Mengintegrasikan program dan kebijakan yang responsif gender ke dalam seluruh bidang Bangunan melalui fasilitasi, pelatihan dan penerapan model Bangunan yang sensitif gender;
- e. Merencanakan penyusunan peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang penerapan, pelaksanaan dan pelayanan serta penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Meningkatkan jejaring kerjasama penanganan kekerasan berbasis gender dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti GOW, TP PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama
- g. Peningkatan Sosialisasi mengenai pengarasutamaan gender dan pengarasutamaan hak anak kepada masyarakat

VII. PRESTASI DINAS KB, PP DAN PA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

Pada tahun 2017 berbagai penghargaan dan prestasi telah diraih oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2017 Tingkat Nasional dengan Kategori PRATAMA
2. Juara 2 Pidato Kependudukan Tingkat Provinsi Jawa Tengah (a.n. Yafi Sahdha Jl. Ganggeng timur RT 01 RW 09, Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara)

VIII. KESIMPULAN

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dapat melaksanakan efisiensi anggaran dari alokasi anggaran sebesar Rp. 30.978.450.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 29.428.503.954,- atau sebesar 95,00%. sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.549.946.046,- atau sebesar 5,00% dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

**Data Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung (Gaji)
Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap Tahun 2017**

No	Belanja	2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja tidak Langsung	15.220.316.000	13.383.604.125	87,93%
	- Belanja Pegawai	15.220.316.000	13.383.604.125	87,93%
2.	Belanja Langsung	8.064.860.000	7.623.758.563	94,53%
	a) Belanja Pegawai	1.305.490.000	1.286.180.000	98,52%
	b) Belanja Barang & jasa	4.605.521.000	4.243.007.113	92,13%
	a) Belanja Modal	2.153.849.000	2.094.571.450	97,25%
	Jumlah	23.285.176.000	21.007.362.688	90,22%

Dari program kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Cilacap, 29 Desember 2017

KEPALA DINAS KB, PP DAN PA
KABUPATEN CILACAP


Drs. SUNARDI, MM.Pd
 Pembina Utama Muda

NIP. 19580806 198103 1 013

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KABUPATEN : CILACAP
NAMA SKPD : DINAS KB, PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
1. Urusan KB dan KS
2. Urusan PP dan PA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan					Keterangan
						Urusan KB dan KS	Urusan PP & PA	Urusan KB & KS	Urusan PP & PA	
1	2	3	4	5	6	9	8	12	11	13
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional yang melekat di kementerian / LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program nasional x 100 %	- Jumlah Program Nasional (RKP) sebanyak 10 Program yaitu : 1 Program Keluarga Berencana 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3 Program pelayanan kontrasepsi 4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 6 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	- Jumlah Program Nasional (RKP) sebanyak 4 Program yaitu : 1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan - Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 4 Program : 1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	5 / 10 X 100% 40,00%	4 / 4 X 100 % 100,00%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan					Keterangan
						Urusan KB dan KS	Urusan PP & PA	Urusan KB & KS	Urusan PP & PA	
1	2	3	4	5	6	9	8	12	11	13
						7 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 8 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 9 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU - Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 4 Program : 1 Program Keluarga Berencana 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3 Program Pelayanan Kontrasepsi 4 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 3 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 4 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Departemen / LPND	2	Keberadaan standar Operating Procedure (SOP)	Ada	1 SOP Tentang Kegagalan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB 2 SOP Tentang Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi 3 SOP Tentang Konseling kepada PUS Calon Peserta KB	1 SOP ttg Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban 2 SOP ttg Buku Panduan Pusat Pelayanan Terpadu PP 3 SOP Bantuan Pendampingan kepada Organisasi Wanita	4 SOP	5 SOP	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan					Keterangan
						Urusan KB dan KS	Urusan PP & PA	Urusan KB & KS	Urusan PP & PA	
1	2	3	4	5	6	9	8	12	11	13
						4 SOP tentang Rujukan Pelayanan KB	4 SOP Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Secara Langsung 5 SOP ttg Sistem Pencatatan dan Pelaporan data Kekerasan thd Perempuan dan Anak			
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG – UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (permen ttg SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100 %	- Perda Pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya sebanyak 1 Perda (9 Indikator SPM)	- Perda Pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya sebanyak 3 Perda (8 Indikator SPM)	0,00%	50,00%	Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
3	PENETAPAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 14 yang terisi sebanyak 14 1 Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Drs. DASRO 2 Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan Drs. AGUS SUBAGYO, 3 Kasi Keluarga Berencana ENDAH WIJAYANTI, SE 4 Kasi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga SRI WIDIYATI KARINI, S.Sos	- Jabatan yang terisi sebanyak 6 yang terisi sebanyak 6 1 Kabid Pemberdayaan Perempuan RINI SUPRAPTI, S.SOS 2 Kabid Kesejahteraan dan Perlindungan anak NURJANAH INDRIYANI, SH 3 Kasi Pengarusatamaan Gender Dan Perlindungan Perempuan Dra. WIWIK WIDIYATMI, MM 4 Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan AGUS PURWANTO, SH	14 / 14 X 100 % 100%	6 / 6 X 100 % 100%	Lihat petunjuk isian IKK

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan					Keterangan
						Urusan KB dan KS	Urusan PP & PA	Urusan KB & KS	Urusan PP & PA	
1	2	3	4	5	6	9	8	12	11	13
						5 Kasi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Dan Pendayagunaan Plkb BENNY PURWANTO, SE, M.Si 6 Kasi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga YUDHASMARA SOEHARTO,SH 7 Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Jeruklegi Drs. NURHAYANI, MM. 8 Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Kroya Dra. NUROCHMAH 9 Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Sidareja ROM MUCHDLORI, S. Ag, MM 10 Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Majenang UDI WAHYUDI,SH, M.Si 11 Ka. TU UPT Dinas Kb, Pp, Dan Pa Wilayah Jeruklegi PANCA ASRI MAWANTUSIH, S.KM 12 Ka. Tu UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Kroya MOHAMAD MUHDI, A.Md 13 Ka. TU UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Sidareja NOFI SULISTIWATI, S.KM 14 Ka. TU UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Majenang R. ACHMAD BASTARI	5 Kasi Perlindungan Anak ERNI SUHARTI, SH., M.Si 6 Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak DARYONO 10 Pelaksana Teknis Bidang PP dan PA - SUSWATI - RETNO PALUPI - RETNO UTAMI - SRI REJEKI HARTIKAWATI, S.Psi. - SRI ENDAH FAJARWATI, S.Akun. - FIRDAUSI RAKHMAWATI,S.PSI - NOLLY SUDRAJAT , S.IP - SUNITA NIRMALASARI			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan					Keterangan	
						Urusan KB dan KS	Urusan PP & PA	Urusan KB & KS	Urusan PP & PA		
1	2	3	4	5	6	9	8	12	11	13	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kopotensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang Relevan dengan urusan terkait				<p>15 Pelaksana Teknis Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga dan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rada, SE - Sanis, SE - Alfie Khairiyah - Waluyo, S.Kom - Minggih Ofanika 					
			5	Keberadaan Jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada Jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	101 orang Fungsional Penyuluh KB	Tidak Ada	100%	0	Hanya terdapat jabatan fungsional Penyuluh KB (PKB)	
			6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Kabupaten Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan KB dan KS, sebanyak 138 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 11.898 Personil 	<ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan PP & PA , sebanyak 16 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 11.898 Personil 	<p>138 / 11.898 X 100 %</p> <p>1,16%</p>	<p>16 / 11.898 X 100%</p> <p>0,13%</p>		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org - Pejabat yang ada sebanyak 16 org 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org - Pejabat yang ada sebanyak 9 org 	<p>14/ 16 X 100 %</p> <p>87,50%</p>	<p>7 / 9 X 100 %</p> <p>77,78%</p>		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan					Keterangan
						Urusan KB dan KS	Urusan PP & PA	Urusan KB & KS	Urusan PP & PA	
1	2	3	4	5	6	9	8	12	11	13
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan Sebanyak 16 org - Jabatan yang ada, sebanyak 16 jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan Sebanyak 9 org - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jabatan 	16 / 16 X 100 % 100,00%	9 / 9 X 100 % 100,00%	untuk jabatan fungsional sebanyak 101 orang dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 101 atau 100%
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada dokumen perencanaan SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD. 	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi program SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPd yang diakomodir dalam renja SKPD, sebanyak 5 Program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPd yang diakomodir dalam renja SKPD, sebanyak 4 Program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program 	5/5*100% 100,00%	4 / 4 X 100 % 100,00%	Mengacu dokumen RKPd tahun 2017 dan renja SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA	11	Jumlah Program Renja RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 Program 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 Program 	100,00%	100%	Mengacu dokumen RKA – SKPD tahun 2017 dan Renja SKPd ybs.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan					Keterangan
						Urusan KB dan KS	Urusan PP & PA	Urusan KB & KS	Urusan PP & PA	
1	2	3	4	5	6	9	8	12	11	13
		SKPD				- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 Program	- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 Program			
		Perencanaan Pelaksanaan program dan anggaran	12	Jumlah Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100	- Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 Program - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 Program	- Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 Program - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 Program	100%	100%	Mengacu dokumen RKA – SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi Belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi Belanja SKPD dibagi total APBD x 100 %	- Total belanja KB dan KS, sebesar Rp. 4.562.230.885,- - Total Belanja APBD sebesar Rp.3.247.680.579.720,-	- Total belanja Urusan PP & PA, sebesar Rp. 973.887.825,- - Total Belanja APBD sebesar Rp.3.247.680.579.720,-	0,22%	0,06%	Mengacu laporan keuangan daerah tahun 2017
		Besaran belanja modal	14	Belanja Modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100 %	- Belanja Modal Urusan KB dan KS, Sebesar Rp. 2.094.571.450,- - Total Belanja SKPD sebesar Rp.7.623.758.563,-	- Belanja Modal Urusan PP, PA, Sebesar Rp. 0,- - Total Belanja SKPD sebesar Rp.7.623.758.563,-	27,47%	0,00%	
		Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 433.617.903,- - Total Belanja barang dan jasa SKPD, Sebesar Rp. 4.243.007.113,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 32.282.992,- - Total Belanja barang dan jasa SKPD, Sebesar Rp. 4.243.007.113,-	10,22%	0,76%	
			16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 433.617.903,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 32.282.992,-	5,69%	0,42%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan					Keterangan
						Urusan KB dan KS	Urusan PP & PA	Urusan KB & KS	Urusan PP & PA	
1	2	3	4	5	6	9	8	12	11	13
						- Total Belanja SKPD sebesar.Rp 7.623.758.563,-	- Total Belanja SKPD sebesar.Rp 7.623.758.563,-			
		Laporan Keunagan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, calk)	- Ada 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Laporan Asset. 5. Buku Pajak 6. Buku Kas Umum 7. Rekening Koran	- Ada 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Laporan Asset. 5. Buku Pajak 6. Buku Kas Umum 7. Rekening Koran	Laporan keuangan ada, sebanyak 7 Jenis, sbb:	Laporan keuangan ada, sebanyak 7 Jenis, sbb:	Teliti apakah laporan keuangan yang ada sudah lengkap (neraca, LRA, Calk)
7	PENGELOLAAN BARANG DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan investasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	- Apabila ada, 1 Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Daerah 2 Buku Inventaris Barang 3 KIB A, KIB B, KIB C , KIB D, 4 Laporan Mutasi Barang 5 Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	- Apabila ada, 1 Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Daerah 2 Buku Inventaris Barang 3 KIB A, KIB B, KIB C , KIB D, 4 Laporan Mutasi Barang 5 Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	Ada Asset yang digunakan SKPD sejumlah 632 asset, senilai Rp. 4.379.818.497,-	Ada Asset yang digunakan SKPD sejumlah 632 asset, senilai Rp. 4.379.818.497,-	Asset tidak dipisahkan per Urusan Asset tidak dipisahkan per Urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan					Keterangan
						Urusan KB dan KS	Urusan PP & PA	Urusan KB & KS	Urusan PP & PA	
1	2	3	4	5	6	9	8	12	11	13
						6 Daftar Aset Tetap Barang	6 Daftar Aset Tetap Barang			
		Penggunaan asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Jumlah Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 632 asset .	- Jumlah Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 632 asset .	0,00%	0	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 tahun
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil Keliling 5.Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Pengumuman. 2. Leaflet 3. Pengumuman di Mass Media 4. Mobil Unit Penerangan 5. Mobil Pengangkut Akseptor 6. Mobil Unit Pelayanan 7. Mobil Box Alokon 8. Mobil Unit Perlindungan	1. Pengumuman. 2. Leaflet 3. Pengumuman di Mass Media 4. Pos Pengaduan	5 Jenis	4 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas / prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada
		Rensponsifitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey Kepuasan masyarakat	tidak ada	- Ada, survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan pengambilan alat dan obat kontrasepsi	- Ada, survey kepuasan tentang pelayanan pengaduan tindak kekerasan secara langsung	Ada	Ada	Survey kepuasan masyarakat / pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan					Keterangan
						Urusan KB dan KS	Urusan PP & PA	Urusan KB & KS	Urusan PP & PA	
1	2	3	4	5	6	9	8	12	11	13

Cilacap, 29 Desember 2017

KEPALA DINAS KB, PP DAN PA
KABUPATEN CILACAP



Drs. SUNARDI, MM.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580806 198103 1 013

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKKPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

DINAS KB, PP DAN PA KABUPATEN CILACAP

NO	URAIAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	$\frac{\text{Pekerja Perempuan dilembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja Perempuan}} \times 100\%$	$\frac{6.900}{320.745} \times 100\%$	2,15%	DINAS KB, PP, DAN PA
		52	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yang melek huruf}}{\text{Jumlah anak perempuan usia >15}} \times 100\%$	$\frac{41.683}{43.210} \times 100\%$	96,47%	DINAS KB, PP, DAN PA
		53	Partisipasi angkatan Kerja Perempuan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah angkatan Kerja Perempuan}} \times 100\%$	$\frac{320.745}{639.578} \times 100\%$	50,15%	DINAS KB, PP, DAN PA
15	KB & KS	54	Prevalensi peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{270.016}{371.404} \times 100\%$	72,70%	DINAS KB, PP, DAN PA
		55	Rasio Petugas lapangan KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap Desa Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan (284 desa / kel)}}{\text{PLKB / PKB (101 orang)}} \times 100\%$	$\frac{284}{101}$	2,81	Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan non PNS yang ditetapkan oleh pejabat yang berkompeten Sedang penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang mempunyai jabatan Fungsional

Cilacap, 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS KB, PP DAN PA
KABUPATEN CILACAP**


Drs. SUNARDI, MM.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580806 198103 1 013